

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 20

TAHUN 2008

PERLU DIRENEGOSIASI

Kontrak IPP Rugikan PLN

Oleh **Happy Amanda Amalia** dan **Imam Suhartadi**

▶ **JAKARTA** – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta PT PLN menegosiasi ulang seluruh kontrak pembelian listrik dari swasta (*independent power producer/IPP*).

Pembangkit Listrik Milik PT PLN dan Anak Usaha

Wilayah	PLTA	PLTU	PLTG	PLTGU	PLTP	PLTD	PLTMG
Jawa	100	27	30	44	7	68	-
Luar-Jawa	103	16	30	9	1	4.600	2
Total	203	43	60	53	8	4.668	2

Sumber: PT PLN

Selama ini, pabrik setrum pelat merah itu membeli listrik swasta dengan harga yang jauh lebih mahal dibanding harga jual listrik dari anak usaha PLN.

Kepala Divisi Pusat Data ICW Firdaus Ilyas mengatakan, dari total komposisi biaya PLN, sebesar 18% dialokasikan untuk pembelian listrik swasta. Bahkan, dengan jenis bahan bakar yang sama, PLN harus membayar kepada listrik swasta sebesar dua kali lipat dibanding pembelian dari anak usaha sendiri.

Firdaus mencontohkan, untuk harga jual listrik PLTU Paiton unit 1 dan 2 yang dikelola anak usaha PLN, PT Pembangkit Jawa Bali (PJB), sebesar Rp 292,37 per kilowatt-hour (kWh). Sementara itu, harga jual listrik PLTU Paiton unit 3 dan 4 yang dikelola swasta, PT Paiton Energy Company (PEC), mencapai Rp 596,88 per kWh.

Kerugian lain PLN adalah pembelian listrik dari PLTU Cilacap yang dikelola PT Segara Sumber Prima (SSP). Dalam laporan bulanan P3B Juni 2007, menurut Firdaus, harga jual listrik PLTU Cilacap sebesar Rp 489,63 per kWh. Sementara itu, harga jual PLTU Paiton unit 5 dan 6 yang dikelola swasta juga PT Jawa Power Rp 533,05 per kWh.

"Dengan harga jual seperti itu bisa dikatakan selama ini subsidi pemerintah dinikmati swasta. Maka dari itu kami minta

PLN meninjau ulang kontrak listrik swasta," ujar Firdaus dalam *media briefing* Penyimpangan Pengelolaan Listrik dan Kontrak Listrik Swasta pada PLN di Jakarta, Kamis (4/9).

Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar yang dihubungi terpisah, kemarin, mempertanyakan kembali data yang disampaikan ICW. "Kalau boleh tahu berapa harga jual swasta ke PLN dan dari anak perusahaan ke PLN dimaksud dan swasta yang mana?" tanya Fahmi.

Perhitungan Modal

Direktur Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa mengungkapkan, harga jual listrik yang lebih tinggi tersebut terjadi karena ada perhitungan modal (*rate of return*) listrik swasta lebih tinggi, sehingga harga yang harus dibayar lebih mahal. Selain itu, sumber dana listrik swasta memiliki tingkat suku bunga yang lebih tinggi, sesuai perhitungan komersial.

Fabby mengakui, kontrak pembelian listrik dari IPP merugikan PLN, namun bukan tidak mungkin direnegosiasi. Seharusnya setelah tujuh tahun, PLN mesti merenegosiasi untuk membayar lebih murah, karena pada tahun itu pembangkit listrik swasta sudah masuk ke tahap komersial.

"Dalam menetapkan sebuah kontrak, PLN mesti mempertimbangkan semua hal, termasuk infrastruktur, kom-

ponen yang dipakai, harga, dan pasokan bahan bakar, sehingga secara keseluruhan tidak merugikan PLN," katanya kepada *Investor Daily*, tadi malam.

Ketua Serikat Pekerja (SP) PT PJB Edy Hartono menjelaskan, dengan menyerahkan pengelolaan pembangkit kepada PJB, selain bisa mengurangi anggaran biaya, PLN juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap asing.

"Di masa mendatang, pemerintah harus mengubah kebijakan energi nasional di mana produksi gas nasional harus diprioritaskan ke PLN, karena pembangkit gas PLN hingga kini masih menggunakan BBM," ujar Eddy.

PLN dapat menghemat biaya operasional sebesar Rp 49 triliun dengan patokan harga beli gas US\$ 3 per *mile-mile british thermal unit* (mmbtu) jika menggunakan gas. "Jika terjadi konversi gas maka kebutuhan belanja operasional PLN sebesar Rp 110 triliun bisa diturunkan lagi," katanya.

Proyek 10 Ribu MW

Sementara itu, pemerintah akan memberikan penyesuaian nilai proyek atau eskalasi dalam proyek 10 ribu megawatt karena adanya kenaikan beberapa material seperti baja dan sebagainya. "Pemerintah memahami eskalasi karena harga material yang mengalami kenaikan seperti baja," kata Fahmi usai rapat di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

Fahmi mengaku belum bisa menentukan berapa besar eskalasi yang akan diberikan.

Fahmi juga menjelaskan bahwa untuk eskalasi tersebut tidak hanya untuk proyek 10 MW namun juga untuk proyek IPP lainnya. Menurut Fahmi untuk proyek 10 ribu MW hingga saat ini telah berjalan sesuai rencana.

Ketua Tim Percepatan Listrik 10 ribu MW Yogo Pratomo mengatakan, proyek 10 ribu MW tahap I diharapkan 2009 selesai sekitar 20% atau bisa diselesaikan 2 ribu MW dan sisanya 8 ribu MW akan selesai 2010.

IPO

Sementara itu, Wakil Dirut PLN Rudiantara mengatakan, pihaknya mendukung rencana pelepasan saham perdana (IPO) dua anak usaha PLN, yaitu PT PJB dan PT Indonesia Power (IP). Kedua perusahaan tersebut ditargetkan masuk bursa pada tahun depan.

"Bisa IPO atau tidak pada 2009, bergantung kesiapan dua perusahaan tersebut dan kondisi pasar," katanya di Kantor Meneg BUMN, kemarin.

Meneg BUMN Sofyan Djalil sebelumnya mengatakan, tahun ini PJB dan IP masih fokus menyelesaikan persoalan piutang dan restrukturisasi hubungan dengan induknya. IPO dua anak usaha PLN ini ditargetkan pemerintah mampu meningkatkan sisi permodalan di sektor pembangkit listrik. "Jika *go public* 30% saja, mereka bisa mendapatkan dana belasan triliun. Dengan demikian, pembangunan proyek 10 ribu MW tahap kedua bisa terbantu," katanya. (c122/c117)

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST
--	---

KODE: <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI	<input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> PANSUS ANGKET
---	--	---

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 20 TAHUN 2008



Program Hemat Energi
 Seorang pegawai melintas di depan poster bertuliskan hemat energi di sebuah gedung pemerintahan di Jakarta, Kamis (4/9). Program hemat energi di gedung-gedung pemerintahan hingga akhir tahun ditargetkan mencapai 20% dari tagihan saat ini, atau sekitar Rp 300 miliar. Target tersebut harus dicapai dari total tagihan listrik pemerintah saat ini yang mencapai Rp 3,1 triliun, dengan konsumsi mencapai 4,6 miliar kWh.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 10

TAHUN 2008

DIVERSIFIKASI ENERGI

Timah Jajaki Bangun PLTU

JAKARTA – PT Timah Tbk (TINS) menjajaki kemungkinan membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk mengantisipasi tingginya kenaikan harga BBM. Selama ini perseroan menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel untuk memenuhi pasokan listrik sekitar 10 megawatt (MW).

"Kami sedang mengkaji kemungkinan perubahan sumber tenaga listrik dari diesel ke batubara," ujar Sekretaris Perusahaan Timah Abrun Abubakar kepada *Investor Daily* di Jakarta, Kamis (4/9).

Abrun mengungkapkan, konversi tersebut akan menekan biaya energi yang terus membengkak. Diversifikasi energi itu dapat menghemat 25% biaya energi perseroan.

Kajian itu, menurut dia, diharapkan rampung secepatnya. Perseroan masih mengkaji apakah PLU itu akan dibangun sendiri, kerja sama dengan pihak lain, atau membeli dari PLN.

Abrun menambahkan, tak tertutup kemungkinan perseroan menggandeng mitra strategis agar lebih efisien, mengingat kebutuhan Timah relatif terbatas.

Dia mengungkapkan, meski manajemen berharap konversi energi dapat dilakukan secepatnya, anggaran untuk perubahan sumber energi dari diesel ke batubara belum dimasukkan dalam belanja modal (*capex*) tahun ini.

Abrun Abubakar juga mengungkapkan, manajemen PT Timah sedang merampungkan ka-

jian mengenai akuisisi PT Sarana Karya. Timah menghendaki kepemilikan mayoritas pada perusahaan BUMN tersebut.

"Bisa saja sampai 100%. Tapi keputusan akhirnya ditentukan berdasarkan hasil *due diligence* yang diharapkan rampung tahun ini," tuturnya.

Dana akuisisi Sarana Karya, menurut Abrun, tidak akan terlalu besar. Timah telah mendapat komitmen pinjaman senilai Rp 5 triliun dari empat bank lokal guna mendanai berbagai aksi korporasi perseroan. "Kami sudah menandatangani MoU dengan mereka dan akan kami tarik dananya jika dibutuhkan," papar dia.

Dia mengemukakan, kenda-ti terjadi penurunan harga komoditas timah dunia, perseroan masih optimistis mampu mengejar target pertumbuhan laba bersih sebesar 10% menjadi Rp 1,96 triliun dari sebelumnya Rp 1,78 triliun.

Hingga semester I-2008, Timah membukukan peningkatan laba bersih 42,43% menjadi Rp 1,11 triliun dibanding periode sama tahun sebelumnya Rp 780,85 miliar. Kenaikan itu tidak terlepas dari kenaikan pendapatan sebesar 3,06% dari Rp 4,08 triliun menjadi Rp 4,20 triliun.

Laba usaha perseroan juga naik 31,57% menjadi Rp 1,67 triliun dari sebelumnya Rp 1,27 triliun. Pencapaian itu turut meningkatkan laba bersih per saham (*earning per share/EPS*) 42,42% menjadi Rp 2.209 dari sebelumnya Rp 1.551. (epa)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 13

TAHUN 2008

Listrik Padam, Operasi Pasien Terhenti

[MAKASSAR] Suasana tegang dialami keluarga Sahara (56), pasien penderita tumor yang sedang menjalani operasi di Rumah Sakit (RS) Labuang Baji, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (3/9). Saat operasi berlangsung, listrik padam dan ironisnya, rumah sakit milik pemerintah itu tidak memiliki cadangan pembangkit listrik.

Sahara, ibu empat anak, warga asal Kalimporo, Tana-tana, Kabupaten Jeneponto, Sulsel itu memasuki ruang operasi sekitar pukul 09.00 Wita, namun sekitar pukul 12.00 Wita ketika operasi sedang

berjalan, seluruh peralatan medis yang menggunakan aliran listrik berhenti bekerja akibat listrik padam. Setelah satu jam lebih menunggu kepastian, keluarga korban gelisah, tak seorang pun anggota tim medis menjelaskan keadaan pasien di ruang operasi.

Ketegangan makin memuncak ketika salah seorang dokter ditanya oleh Ismi, keluarga korban, jawaban yang diterima tidak memuaskan. "Pak Dokter, bagaimana keadaan keluarga saya, dokter hanya menjawab, belum tahu karena listrik lagi padam," katanya seperti ditirukan Ismi.

Guppa Dg Ngalle, suami



Guppa Dg Ngalle menangis memeluk putrinya di depan ruang operasi Rumah Sakit Labuang Baji, Rabu (3/9). Dia khawatir, istrinya, Sahara, meninggal karena saat sedang dioperasi tumor, listrik di rumah sakit tersebut padam lebih dari satu jam.

korban langsung menangis memeluk putrinya, diikuti keluarga lainnya sehingga suara tangisan di depan ruang operasi menarik perhatian para medis serta pengunjung di rumah sakit tersebut. Anehnya, melihat kejadian itu, para medis bukannya menenangkan, mereka malah menertawai keluarga kor-

ban sehingga salah seorang keluarga korban marah.

Menginformasikan

Sekretaris RS Labuang Baji, Drg Sri Fausyia, M.Kes mengatakan, agar kejadian itu tidak terulang, pihaknya meminta kepada PLN, jika akan melakukan pemadaman, terlebih dahulu

menginformasikan ke rumah sakit agar dapat disesuaikan dengan jadwal operasi pasien.

Saat listrik padam di rumah sakit tersebut, tercatat ada tiga operasi yang sedang berlangsung. Namun, semua berjalan lancar dan selamat, walaupun listrik sempat padam dan baru menyala sekitar

pukul 14.30 Wita.

Sementara itu, General Manager PT PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara (Sulselrabar) Andi Arufuddin Nurdin yang dihubungi saat itu membantah padamnya listrik di rumah sakit tersebut akibat terjadi pemadaman bergilir.

"Tidak ada pemadaman listrik bergilir di Makassar, itu akibat gangguan jaringan dari pembangkit listrik di PLTA Bakaru, tepatnya terjadi pada jaringan yang ada di Kota Parepare akibat angin kencang," katanya.

Kalau listrik di rumah sakit padam, jangan PLN yang disalahkan. Sebab, setiap rumah sakit sudah diharuskan mempunyai genset (pembangkit listrik) untuk dapat mengantisipasi jika listrik padam tiba-tiba. "Kejadian itu akibat kelalaian pihak rumah sakit, harusnya mereka siapkan genset karena setiap saat listrik dapat saja padam akibat berbagai hal," jelasnya.

Menanggapi keharusan rumah sakit memiliki mesin listrik cadangan, Fausyia mengatakan, sebenarnya di rumah sakit ini ada, hanya saja rusak dan sedang diproses pengadaan mesin genset baru 500 kVA (kilovolt ampere) untuk menggantikan mesin yang rusak tersebut. [148]

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 (5) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 117

TAHUN 2008

Pengembang Listrik Mendapat Eskalasi

JAKARTA— Pengembang proyek listrik swasta 10 ribu megawatt berpeluang mendapat eskalasi terkait dengan dampak krisis energi. Besaran eskalasi itu bervariasi, bergantung pada besaran kenaikan harga komponen terdampak. "Ada kemungkinan akan diperhitungkan yang disesuaikan dengan harga dan kondisi riil," kata Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar di kantor Wakil Presiden kemarin.

Sebelumnya, sejumlah pengusaha jasa konstruksi meminta eskalasi akibat kenaikan harga minyak dunia. Menurut Fahmi, renegotiasi harga sudah dilakukan beberapa kontraktor lokal. Terutama, dia melanjutkan, kontraktor yang ada di luar Jawa. "Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan akan menghitung sesuai dengan nilai kewajaran harga," ujarnya.

Dia mengatakan sumber pendanaan eskalasi itu berasal dari perbankan nasional. Sebagian besar kontrak-

tor yang meminta eskalasi itu berasal dari dalam negeri. "Ada juga yang perusahaan listrik swasta di 21 lokasi," ujarnya.

Fahmi menambahkan, peraturan presiden tentang proyek listrik tahap kedua akan segera terbit. Pihaknya kini sedang menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang menjadi landasan terbitnya peraturan tersebut. "Rencana itu masih perlu didetailkan sekali lagi sebelum dipaparkan ke pemerintah," katanya.

Fahmi mengatakan, mulai 2011 dan seterusnya, Indonesia membutuhkan tambahan pembangkit listrik. Rencananya, pemerintah akan membangun pembangkit listrik yang menghasilkan daya hampir 11 ribu megawatt. "Diharapkan proyek pembangkit listrik tahap kedua itu bisa memasok kebutuhan listrik dalam sistem Jawa-Bali-Sumatera-Kalimantan pada 2012," ujarnya.

● KURNIASIH BUDI

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 13

TAHUN 2008

LISTRIK

PLN Harus Renegosiasi Kontrak

JAKARTA (MI): Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak PT PLN (Persero) menegosiasi ulang seluruh kontrak pembelian listrik swasta. Pasalnya, selama ini PLN membeli listrik swasta dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan harga jual listrik dari anak perusahaan PLN.

Kadiv Pusat Data ICW Firdaus Ilyas menuturkan, dari total komposisi biaya PLN, sebesar 18% dialokasikan untuk pembelian listrik swasta.

"Dengan jenis bahan bakar yang sama, PLN harus membayar sebesar dua kali lipat kepada listrik swasta dibandingkan pembelian dari anak perusahaan PLN," paparnya di Jakarta, kemarin.

Ia mencontohkan, harga jual listrik PLTU Paiton unit 1 dan 2 yang dikelola anak usaha PLN, PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) sebesar Rp292,37 per kilowatt-hour (kWh), sedangkan harga jual listrik PLTU Paiton unit 3 dan 4 yang dikelola swasta, PT Paiton Energy Company (PEC), mencapai Rp596,88 per kWh.

Tidak hanya harga listrik PEC saja yang tinggi. Menurut data ICW yang diambil dari laporan bulanan P3B Juni 2007, harga jual listrik PLTU Cilacap yang dikelola swasta PT Segara Sumber Prima (SSP) sebesar Rp489,63 per kWh. Adapun harga jual PLTU Paiton unit 5 dan 6 yang dikelola swasta PT Jawa Power Rp533,05 per kWh.

Dengan harga jual seperti ini, lanjut Firdaus, bisa dikatakan selama ini subsidi pemerintah dinikmati oleh swasta.

"Makanya kami minta PLN meninjau ulang kontrak listrik swasta," tandasnya.

Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar, ketika dimintai komentarnya, justru balik mempertanyakan data yang disampaikan ICW.

(Pia/E-2)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 23

TAHUN 2008

KELISTRIKAN

Listrik Padam lagi di Bulan Ramadan

MEDAN (MI): Listrik di Medan, Sumatra Utara, kembali padam di bulan Ramadan. Pemadaman terjadi di sejumlah kecamatan di Kota Medan ketika umat muslim tengah khusyuk salat tarawih.

PLN Wilayah Sumut sebelumnya sudah berjanji tidak akan melakukan pemadaman selama Ramadan.

Pemadaman terjadi di Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Denai, dan Kecamatan Medan Johor. Selama Ramadan ini, sudah dua kali terjadi pemadaman listrik.

Salah seorang warga, Erika, 34, menyesalkan pemadaman listrik selama bulan Ramadan. "Pada hal, katanya tidak akan ada pemadaman selama bulan Ramadan," keluhnya, kemarin.

Karena stok batu bara menipis, pemadaman bergilir berlangsung di Kota Palu dan sejumlah wilayah di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Sebagian wilayah di Bandung dan sekitarnya juga akan mengalami pemadaman listrik. Pemadaman bergilir akan dimulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB karena perbaikan jaringan.

Pemadaman listrik bergilir di beberapa wilayah di Bandung, antara lain terjadi di Jl Laswi, RE Martadinata, Ahmad Yani, Cianjur, Riau, Sumedang, Garut, Sukabumi, Majalengka, Cintaasih, dan Cibangkong.

PT PLN segera membangun tiga pembangkit tenaga listrik di Pulau Timor, NTT, paling lambat 2010.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, bertekad menerapkan *solar cell* (tenaga surya) untuk kebutuhan penerangan jalan umum (PJU) di wilayahnya. (YN/EM/HF/PO/YK/N-2)

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

AN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 18

TAHUN 2008

ENERGI

Eskalasi Proyek Listrik Hanya untuk Mitra Lokal

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyetujui untuk memperhitungkan eskalasi pembiayaan proyek percepatan kelistrikan, terkait kenaikan harga bahan baku. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP diminta menghitung nilai eskalasi.

Direktur PT Perusahaan Listrik Negara Fahmi Mochtar mengemukakan hal itu sesuai mengikuti rapat koordinasi proyek percepatan pembangkit berbahan bakar batu bara di Istana Wakil Presiden, Kamis (4/9). "Eskalasi ini untuk proyek pembangkit skala kecil di luar Jawa. Kebanyakan memang komponen lokalnya cukup dominan," ujarnya.

Fahmi menjelaskan, eskalasi hanya untuk mitra usaha lokal, bukan mitra asing, seperti kontraktor China. Adapun mengenai kemungkinan penambahan dana jika terjadi eskalasi, PLN akan mencari sumber pembiayaan dari perbankan nasional.

Dalam proyek percepatan pembangkit, PLN berencana membangun 10 pembangkit listrik di Jawa dengan total daya sekitar 7.200 MW dan 25 pembangkit listrik di luar Jawa dengan total daya sekitar 3.000 MW. Persetujuan atas eskalasi nilai proyek itu menunggu perhi-

tungan BPKP. Komponen yang menyebabkan kenaikan biaya pembangunan akan terlihat pada kenaikan harga per kWh.

Fahmi mengakui, permintaan penyesuaian harga pembangunan pembangkit juga disampaikan sejumlah kontraktor China yang membangun PLTU di Jawa.

Namun, menurut Fahmi, PLN belum tentu memenuhi permintaan tersebut. "Harga yang ditender PLN waktu itu masih bagus," kata Fahmi.

Ketua Tim Pelaksana Harian Proyek Percepatan Yogo Pratomo menyatakan, dalam rapat itu terungkap, PT PLN tak lagi memiliki kemampuan meminjam dana untuk membiayai proyek percepatan tahap kedua.

Oleh karena itu, lanjut Yogo, pilihannya adalah menggunakan skema pembangkit listrik swasta. "Kalau tidak, pemerintah harus membantu keuangan PLN melalui penyertaan modal atau menaikkan tarif dasar listrik. Opsi penyertaan modal sulit karena subsidi untuk PLN sudah mencapai Rp 80 triliun," katanya.

Untuk proyek percepatan pembangkit tahap pertama, PLN mencari pinjaman 4,4 miliar dolar AS dan Rp 17,5 triliun.

(HAR/DOT)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 16)

TAHUN 2008

PLN may borrow from bank of China, BNP

JAKARTA: PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Indonesia's state utility, is in talks to borrow US\$2 billion from a group led by Bank of China Ltd. to build coal-fired power plants in Java and Bali.

The lenders include BNP Paribas and the Export-Import Bank of China. Fahmi Mochtar, president director at PLN, told reporters in Jakarta Thursday.

Indonesia, Southeast Asia's biggest economy, wants to use more coal and gas to generate electricity because they are cheaper than oil.

PLN plans to add 10,000 megawatts of coal-fired generation, or about 42 percent of its current capacity, by 2010.

The utility plans to build an additional 11,100 megawatts of generation capacity, 68 percent of which will use coal, by 2012, Mochtar said.

Perusahaan Listrik Negara will generate 2,100 megawatts of electricity from geothermal power plants and 1,100 megawatts from gas generators, while the rest will use hydropower. — Bloomberg

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 10

TAHUN 2008

Pemerintah Berikan Eskalasi 10 Ribu MW

Pemerintah akan memberikan penyesuaian nilai proyek atau eskalasi dalam proyek 10 ribu Megawatt karena adanya kenaikan beberapa material seperti baja dan sebagainya.

"Pemerintah memahami eskalasi karena harga material yang mengalami kenaikan seperti baja," kata Dirut PT PLN Fahmi Mochtar.

Fahmi mengaku belum bisa menentukan berapa besar eskalasi yang akan diberikan. Dia menjelaskan, eskalasi tersebut tidak hanya untuk proyek 10 MW namun juga untuk proyek IPP lainnya.

Menurut Ketua Tim Percepatan Listrik 10 Rb Mw, Yogo Pratomo, proyek 10 ribu mw tahap I diharapkan selesai tahun 2009 sekitar 20 persen, dan sisanya 8 ribu mw akan selesai 2010.

Sedangkan untuk pendanaan sudah sesuai rencana. Saat ini, dari kebutuhan valas US\$ 4,5 miliar. Sebesar US\$ 1,5 miliar sudah diteken kontraknya. Sementara sebesar US\$ 2 miliar sedang dalam negosiasi. "Sisanya US\$ 1,5 miliar akan dinegosiasi. Untuk rupiah berjumlah Rp 17,5 triliun, sudah tersedia Rp 13 triliun," kata Yogo.

11

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input checked="" type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST	
KODE: <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI	<input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> PANSUS ANGKET
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST <u>SEP</u> OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN: 14		TAHUN 2008

Pemerintah Kaji Eskalasi Proyek 10.000 MW

JAKARTA (SINDO) – Pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian nilai (eskalasi) proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt (MW) terkait kenaikan harga komponen.

Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar mengatakan, perhitungan eskalasi akan dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. "Tadi hadir Ketua BPKP. Karena itu juga akan diakomodasi, akan dilakukan perhitungan-perhitungan kewajaran yang diusulkan," kata dia sesairapat proyek 10.000 MW tahap 1 dan 2 di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

Fahmi menampik jika eskalasi merupakan permintaan pihak China. Menurutnya, usulan tersebut berasal dari kontraktor lokal, terutama di luar Pulau Jawa. "Sebetulnya bukan dalam rangka 10.000 MW saja, juga ada *independent power producers* (IPP), dan itu umumnya adalah kon-

traktor dalam negeri dan itu, ya tersebar," jelasnya.

Mengenai besarnya eskalasi, Fahmi menilai hal tersebut sangat bervariasi, bergantung pada seberapa besar komponen yang dipersoalkan. Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa mengungkapkan berapa persen kemungkinan nilai eskalasi. Adapun sumber pendanaannya kemungkinan berasal dari perbankan nasional.

Sementara itu, Ketua Tim Koordinasi Percepatan Proyek PLTU 10.000 MW Yogo Pratomo menambahkan, sejauh ini perkembangan proyek 10.000 MW sudah sesuai dengan jadwal dan diharapkan 20% proyek rampung pada 2009. "Kita harapkan 2009 itu sekitar 20% atau 2.000 MW bisa diselesaikan dan sisanya 8.000 MW akan selesai 2010," kata dia.

Yogo juga mengatakan, pendanaan untuk proyek 10.000 MW sudah berjalan sesuai kebutuhan. Sebanyak

USD1,5 miliar dari USD4,5 miliar kebutuhan valuta asing sudah ditandatangani. Kemudian, USD2 miliar masih dalam tahap negosiasi dengan perbankan internasional. Sementara sisanya USD1 miliar akan dinegosiasikan lebih lanjut.

Sementara untuk komponen rupiah, dari Rp17,5 triliun yang dibutuhkan, telah tersedia sebanyak Rp13 triliun. "Kalau dana dari dalam negeri yang bersifat dana rupiah ini mungkin akan lebih mudah diperoleh dari bank-bank dalam negeri," ujarnya.



Kita harapkan 2009 itu sekitar 20% atau 2.000 MW bisa diselesaikan dan sisanya 8.000 MW akan selesai 2010.

YOGO PRATOMO

Ketua Tim Koordinasi Percepatan
Proyek PLTU 10.000 MW

Selanjutnya, dari 10 lokasi proyek 10.000 MW di Jawa-Bali, sekitar sembilan lokasi yang kontraknya sudah ditandatangani. Sementara sisanya di Cilacap, masih dalam proses evaluasi tender dan dalam waktu dekat akan segera ditandatangani. Dari 25 lokasi di luar Jawa-Bali, baru 22 lokasi yang sudah ada kontraknya. Sisanya yakni di Kalimantan Barat masih *retender* dan dua lokasi lain dalam proses negosiasi harga.

Selain membahas soal proyek 10.000 MW tahap 1, rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan dihadiri sejumlah menteri terkait ini, juga membahas soal proyek 10.000 MW tahap 2. Dalam rapat tersebut, PLN diminta untuk menyelesaikan persoalan teknis lebih rinci lagi.

(maya sofia)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 15

TAHUN 2008

PGN Mulai Pasok Gas ke Muara Tawar

JAKARTA— PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mulai memasok gas untuk PLTGU Muara Tawar. Pasokan gas yang baru dilakukan pekan lalu, merupakan program gasifikasi pembangkit PT PLN (Persero).

Sekretaris Perusahaan PGN Heri Yusup menuturkan, meski sudah dialirkan pekan lalu, namun volume gas yang dialirkan belum stabil. "Kita sudah mulai kirimkan gasnya minggu kemarin, tapi masih *trial run*. Sebab, kita masih melakukan *setting-setting*, jadi volumenya belum stabil," ujarnya di Jakarta, Rabu (3/9) malam.

Berdasarkan kontrak yang disepakati, volume gas yang harus dialirkan sebesar 200 ju-

ta kaki kubik per hari (mmscfd). Namun, menurut Heri, dalam kontrak juga ada opsi tambahan 100 mmscfd lagi, yang pasokannya tergantung ketersediaan PGN. "Tergantung suplai kita. Kalau ada kita alirkan, kalau tidak ada yang *nggak*," katanya.

Lebih lanjut ia menuturkan, diperkirakan volume penuh sebesar 200 mmscfd baru bisa tercapai awal 2009. "Kalau sekarang sampai akhir tahun, tampaknya tidak bisa sampai penuh 200 mmscfd. Paling di atas 100 mmscfd," tandasnya.

Mengenai harga, lanjutnya, sesuai kesepakatan, PLN akan membayar sebesar 4,5 dolar AS per mmbtu untuk pasokan 50 mmscfd pertama. Sedang,

untuk pasokan selanjutnya menggunakan harga industri, yakni 5,5 dolar AS per mmbtu.

Untuk menekan biaya operasional di tahun 2008, PLN mempercepat proses gasifikasi sejumlah pembangkitnya yang menggunakan bahan bakar gas. Dari gasifikasi ini, diperkirakan PLN bisa menghemat sekitar Rp 5 triliun.

LNG Tangguh

Dalam kesempatan sama, Dirut PGN Hendi P Santoso mengatakan, pihaknya telah mengajukan permintaan kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) untuk membeli produksi LNG dari Lapangan Tangguh, Pa-

pua. Rencananya PGN berminat membeli LNG dari Tangguh sebesar 1,5 juta ton per tahun (MTPA).

"Kami sudah ajukan permintaan untuk membeli LNG dari Tangguh kepada BP Migas dan Pak Kardaya (Staf Ahli Menteri ESDM bidang Komunikasi dan Informasi, red)," ujar Hendi.

Pasokan LNG dari Lapangan Tangguh ini, jelasnya, untuk melengkapi pasokan 1,5 MTPA yang sudah diperoleh dari Lapangan gas Sisi Nubi, Kalimantan Timur, yang dikelola Total Indonesia. "Kan gas-nya itu pada dasarnya milik negara. Jadi terserah pemerintah mau kasih atau tidak," tambahnya. ■ dia

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 15

TAHUN 2008

ICW: Renegosiasi Kontrak Listrik Swasta

PLN harus membayar dua kali lipat untuk listrik swasta.

JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak PT PLN (Persero) menegosiasi ulang seluruh kontrak pembelian listrik swasta. Peralnya, selama ini PLN membeli listrik swasta dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan harga jual listrik dari anak perusahaan PLN.

Kadiv Pusat Data ICW Firdaus Ilyas menuturkan, dari total komposisi biaya PLN, sebesar 18 persen dialokasikan untuk pembelian listrik swasta. "Dengan jenis bahan bakar yang sama, PLN harus membayar kepada listrik swasta sebesar dua kali lipat dibandingkan pembelian dari anak perusahaan PLN," paparnya di Jakarta, Kamis (4/9).

Dicontohkannya, harga jual listrik PLTU Paiton unit 1 dan 2 yang dikelola anak usaha PLN, PT Pembangkit Jawa Bali (PJB), sebesar Rp 292,37 per kilowatt-hour (kWh). Sedangkan harga jual listrik PLTU Paiton unit 3 dan 4 yang dikelola swasta, PT Paiton Energy Company (PEC), mencapai Rp 596,88 per kWh.

Tidak hanya harga listrik PEC saja yang tinggi, menurut data ICW yang diambil dari laporan bulanan P3B Juni 2007, harga jual listrik PLTU Cilacap yang dikelola swasta PT Segara Sumber Prima (SSP) sebesar Rp 489,63 per kWh. Sementara harga jual PLTU Paiton unit 5 dan 6 yang dikelola swasta juga PT Jawa Power Rp 533,05 per kWh. Dengan harga jual seperti ini, lanjut Firdaus, bisa dikatakan

selama ini subsidi pemerintah dinikmati oleh swasta. "Makanya kami minta PLN meninjau ulang kontrak listrik swasta," tandasnya.

Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar ketika dimintai komentarnya, justru balik mempertanyakan data yang disampaikan ICW. "Kalau boleh tahu berapa harga jual swasta ke PLN dan dari anak perusahaan ke PLN dimaksud dan swasta yang mana," ujar Fahmi dalam pesan singkatnya.

Sementara Ketua Serikat Pekerja (SP) PT PJB Edy Hartono menuturkan, selain bisa mengurangi anggaran biaya, dengan pengelolaan sendiri, PLN juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap asing. Di samping itu, lanjut Edy, ke depannya pemerintah harus mengubah kebijakan energi nasional. "Produksi gas nasional harus diprioritaskan ke PLN, karena pembangkit gas PLN hingga kini masih menggunakan BBM," ujarnya.

Firdaus menambahkan, jika menggunakan gas, maka PLN bisa menghemat biaya operasional sebesar Rp 49 triliun dengan patokan harga beli gas 3 dolar AS per MM-BTU. "Jika terjadi konversi gas maka kebutuhan belanja operasional Rp 110 triliun bisa diturunkan lagi," jelasnya.

10 ribu MW

Sementara itu, pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawatt yang dicanangkan pemerintah sejak dua tahun lalu telah berjalan sesuai jadwal. Direncanakan, 2 ribu megawatt pasokan listrik sudah bisa masuk ke dalam jaringan PLN pada 2009 dan selebihnya pada 2010.

Ketua Tim Perpres Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10 ribu megawatt, Yogo Pratomo, mengatakan pembangunan pembangkit ini sudah sesuai rencana. Pendanaannya pun sudah sesuai dengan kebutuhannya. Dari kebutuhan dana valas senilai 4,5 miliar dolar AS, PLN telah menandatangani kontrak peminjaman sebesar 1,5 miliar dolar AS, 2 miliar dolar AS sedang dinegosiasikan, dan 1 miliar dolar AS sisanya sedang dalam negosiasi lanjutan.

"Sementara kebutuhan dana dalam rupiah yang mencapai Rp 17,3 triliun, sebesar Rp 13 triliun sudah diperoleh dan sisanya masih dalam proses," paparnya di Kantor Wapres di Jakarta, kemarin (4/9).

Perkembangan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawatt itu secara khusus dibahas di Kantor Wapres. Menurut Yogo, PLN saat ini tengah melelang dua lokasi pembangkit di Cilacap dan Kalimantan Barat. "Semua berjalan sesuai jadwal," ujarnya.

Dalam program 10 ribu megawatt ini, Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar menjelaskan, 10 pembangkit dibangun di Jawa-Bali dengan kapasitas sekitar 7.000 megawatt. Sedangkan di luar Jawa-Bali dibangun sebanyak 25 pembangkit dengan kapasitas 3.000 megawatt. Dengan perincian 22 lokasi pembangkit sudah diteken kontrak pembangunannya dan dua pembangkit sedang dinegosiasikan harganya. "Pembangkit Labuan diperkirakan sudah bisa masuk jaringan Maret 2009, sekarang sudah 70 persen pembangunannya," jelasnya. ■ dia/djo

001

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 11

TAHUN 2008

Proyek 10.000 MW terbuka untuk eskalasi

Oleh JOHN ANDHI OKTAVERI
Bisnis Indonesia

JAKARTA. Pemerintah kemungkinan memberikan peluang untuk penyesuaian nilai proyek (eskalasi) dalam proyek pengadaan listrik Program 10.000 mega watt (MW) karena kenaikan harga sejumlah komponen proyek yang tidak bisa dihindari.

Dirut PT. PLN Fahmi Mochtar mengatakan pertimbangan eskalasi itu didasarkan akibat terjadinya kenaikan sejumlah komponen harga dari material yang digunakan dalam proyek pembangunan pembangkit listrik.

"Tadi Kepala BPKP [Didi Widayadi] ikut hadir, karena itu [eskalasi] akan diakomodasi. Jadi nantinya akan dilakukan perhitungan dalam tingkat kewajaran. Beberapa material yang naik itu seperti baja," kata Fahmi usai rapat percepatan pembangunan PLTU 10.000 MW tahap I dan II yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla, ke-

marin.

Hadir dalam rapat itu Plt. Menko Perekonomian/Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Meneg BUMN Sofyan Djilil, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri PU Djoko Kirmanto dan Kepala BPKP Didi Widayadi.

Menurut Fahmi permintaan eskalasi itu bukan saja diajukan oleh kontraktor asing, melainkan juga sudah diajukan oleh sebagian besar kontraktor lokal.

"Bukan dalam rangka yang 10.000 MW saja, tetapi juga IPP [Independent Power Producers] dan itu umumnya kontraktor dalam negeri," kata Fahmi didampingi Ketua Tim Percepatan Listrik 10.000 MW Yogo Pratomo.

Dirut PLN itu belum bisa menentukan berapa besar eskalasi yang akan diberikan. Namun, dia memberikan sinyal kemungkinan kenaikan itu akan sa-

ngat variatif dan bergantung pada seberapa besar komponen material yang dipersoalkan. "Kami tidak bicara sekian persen, tapi kami akan melihat kondisi riil yang harus kami akomodasi. Sumber dana penyesuaian itu nantinya dari bank nasional," katanya.

Pada kesempatan itu Fahmi menjelaskan bahwa untuk proyek listrik 10.000 MW tahap pertama terdapat 10 lokasi di Jawa Bali dengan kapasitas mendekati 7.000 MW. PLTU di luar Jawa dan Bali ada 25 lokasi dengan kapasitas hampir 3.000 MW.

"Dari semua itu, di Jawa-Bali sudah terkontrak sembilan lokasi, sementara yang di luar Jawa-Bali sudah 22 lokasi yang ditandatangani kontraknya."

Fahmi menjelaskan pemerintah juga akan mulai menggarap proyek 10.000 MW tahap kedua dengan perincian berkapasitas 5.000 MW di Jawa-Bali dan 2.600 MW di luar Jawa.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 (5) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2008

Khusus untuk Proyek Listrik Ada Eskalasi

Anggarannya berasal dari pinjaman bank dalam negeri

Yohan Rubiyantoro

JAKARTA. Inilah kabar yang pasti membuat pengusaha pemenang tender pembangunan pembangkit listrik akan berjingkrak senang. Pemerintah sedang mempertimbangkan pemberian penyesuaian nilai proyek atau eskalasi dalam proyek pengadaan listrik. Tak terkecuali di dalamnya proyek pembangkit listrik 10.000 Mega Watt (MW).

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Fahmi Mochtar menyampaikan informasi ini setelah mengikuti rapat percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW di Kantor Wakil Presiden, Kamis (4/9) kemarin. Di situ terungkap, material pembangunan proyek listrik yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi adalah baja.

Fahmi mengatakan, pemerintah melihat realitas kenaikan harga sejumlah material dalam proyek pembangunan pembangkit listrik. "Pemerintah akan mengakomodasi dan melakukan penghitungan eskalasi dalam tingkat kewajaran," kata Fahmi.

Ia juga menjelaskan, pengusaha yang mengajukan permintaan eskalasi ini sebagian besar adalah kontraktor lokal. Fahmi memastikan pertimbangan memberi eskalasi ini bukan dalam rangka proyek listrik 10.000 MW saja. "Eskalasi juga berlaku pada proyek pembangunan pembang-

kit listrik swasta atau *independent power producer* (IPP)," terang Fahmi.

Pendanaan dari bank

Namun Fahmi belum bisa menentukan nilai nominal eskalasi ini. Dia beralasan kenaikan itu akan sangat variatif tergantung seberapa besar komponen material yang dipersiapkan. "Kami tidak bicara sekian persen, tapi melihat kondisi rill yang harus kami akomodasi," kata Fahmi.

Yang jelas, Fahmi mengaku tidak meminta tambahan dana eskalasi ini dari anggaran negara. Untuk menyesuaikan nilai proyek listrik, "Sumber dananya akan kami ambil dari perbankan nasional," kata Fahmi.

Sebaliknya, pemberian eskalasi proyek listrik tentu membuat pengusaha jasa konstruksi tersenyum kecut. Walau perdebatan masih berlanjut, pemerintah telah memutuskan untuk menolak pemberian eskalasi proyek konstruksi.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN :

3

TAHUN 2008

Proyek Listrik 10.000 MW Siap Memasuki Tahap II

PROYEK pengadaan pembangkit listrik 10.000 MW Tahap I terus berjalan cepat. Di Jawa dan Bali, setidaknya tersebar sepuluh proyek dengan kapasitas listrik 7.000 MW. Sedangkan di luar Jawa dan Bali, ada 25 lokasi dengan total kapasitas listrik sebesar 3.000 MW. "Sembilan lokasi di Jawa-Bali dan 22 lokasi di luar Jawa-Bali, sudah kami kontrak," kata Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar.

Ketua Tim Percepatan Listrik 10.000 MW Yogo Pratomo menambahkan, pelaksanaan proyek tahap I ini berjalan sesuai jadwal. Dia berharap 20% dari total proyek akan selesai pada 2009 dan sisanya selesai 2010. Dari sisi pendanaan pun tak ada masalah. Dari kebutuhan valuta asing sebanyak US\$ 4,5 miliar, sudah ada penandatanganan kontrak sebesar US\$ 1,5 miliar.

Yogo mengaku masih melakukan negosiasi dengan perbankan internasional untuk kontrak senilai US\$ 2 miliar dan US\$ 1 miliar. Adapun untuk pendanaan rupiah sebesar Rp 17,5 triliun, sudah tersedia Rp 13 triliun.

Saat ini, PLN sudah bersiap melaksanakan proyek 10.000 MW tahap II. Kali ini Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali jatahnya sama.

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 13

TAHUN 2008

■ MENGATASI KRISIS LISTRIK

Proyek Perluasan Tanjung Jati B Berlanjut

JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Sumitomo Corporation sepakat melanjutkan kembali proyek perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B. Proyek yang tertunda sejak peninjauan pada 2006 itu kembali digulirkan setelah ada pinjaman dana dari Japan Bank for International Corporation (JBIC).

Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil mengatakan, kerjasama dengan Sumitomo akan menguntungkan PLN. Pasalnya, harga yang ditawarkan Sumitomo lebih murah dari semua investor proyek listrik swasta (Independent Power Producers/IPP) lainnya. "Pemerintah mendukung PLN dalam kerjasama ini," kata Sofyan, Kamis (4/9).

Sofyan mengharapkan, pendanaan proyek dapat diselesaikan tahun ini. Sehingga, pembangunan perluasan proyek PLTU berkapasitas 2 x 600 megawatt (MW) itu bisa selesai tahun 2011. "Dengan demikian, pada 2011 itu kekurangan listrik sudah teratasi," ujar Sofyan.

Pendanaan perluasan PLTU Tanjung Jati B ini sepenuhnya dipecahkan oleh Sumitomo. Dengan dana dari JBIC, Sumitomo

akan memperluas kapasitas Tanjung Jati B menjadi 4 x 660 megawatt (MW). Saat ini, pembangkit yang berlokasi di Jepara, Jawa Tengah itu baru memiliki kapasitas produksi setrum sebesar 2 x 600 MW.

Mekanisme perluasan PLTU Tanjung Jati B ini menggunakan skema bangun-operasikan-transfer (BOT). Setelah membangun perluasan itu, Sumitomo akan menyewakannya kepada PLN dengan jangka waktu 23 tahun. Selanjutnya, perusahaan setrum negara ini akan bertindak selaku operator PLTU tersebut. PLN yang akan menyuplai bahan bakar batubaranya dan mengoperasikan PLTU tersebut. Pada akhir kontrak, ada opsi PLN bisa memiliki pembangkit.

Seperti diketahui, proyek pembangunan perluasan PLTU Tanjung Jati B ini merupakan proyek yang tertunda sejak peninjauan dilakukan pada tahun 2006. "Proyek ini sudah lama dijajaki, jadi tinggal melanjutkan saja. Kalau tidak, kami sulit memenuhi permintaan listrik," timpal Wakil Direktur Utama PLN Rudiantara, kemarin.

Hikmah Yanti, Andri Indradie

7

Tangguh yang terburuk sangat tidak beralasan. Alasannya, dalam renegotiasi tersebut pemerintah hanya melakukan negosiasi harga, itu pun hanya mendapatkan kenaikan sebesar US\$ 1 sehingga menjadi US\$ 3,345 per mmbtu dari harga kontrak awal sebesar US\$ 2,6 per mmbtu.

"Kalau ada tudingan proyek LNG Tangguh berpotensi merugikan negara sebesar Rp 700 triliun sama sekali tidak berdasar. Angka tersebut hanya berdasarkan asumsi harga gas saat itu sebesar US\$ 20 per mmbtu dikurangi harga renegotiasi sebesar US\$ 3,345 per mmbtu dikalikan volume penjualan gas sebesar 7,6 juta ton," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengaku pihaknya masih akan mengkaji kasus jual-beli LNG Tangguh secara proporsional. KPK sejauh ini belum memiliki rencana untuk menyelidiki kasus LNG Tangguh. "Minimal barang bukti yang kami pegang 60%, baru kami bertindak," ujarnya.

Purnomo Siap Jelaskan

Sementara itu, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menyatakan kesiapannya menjelaskan persoalan kontrak LNG Tangguh kepada pihak-pihak yang memerlukan. Sebelumnya, Purnomo juga menyatakan siap mundur jika memang diminta Presiden.

Purnomo mengatakan, harga kontrak LNG ke Fujian sebesar US\$ 2,4 per mmbtu sesuai pasar 2002. Bahkan, saat itu, Qatar pernah menjual LNG hanya US\$ 1,5 per mmbtu. Demikian pula, pemakaian batas atas kontrak Fujian karena harga ditentukan pembeli dan saat itu semua memakai patokan batas atas.

Tender Guangdong diikuti enam peserta yang setelah tahap seleksi pertama terpilih Qatar, Australia, dan Indonesia. Indonesia akhirnya kalah dari Australia. Namun, karena hubungan baik, menurut Purnomo, Tiongkok memberikan kontrak Fujian tanpa tender ke Indonesia dengan syarat harganya sama dengan Guangdong. (nov/ref)